

ABSTRAK

Kompleksitas dalam masalah pengadaan tanah menunjukkan perlunya pemerintah untuk segera mengkaji ulang kebijakan pertanahan. Selama ini, pemerintah menggunakan instrumen pengadaan tanah untuk memperoleh lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan fasilitas umum. Konsep bank tanah dapat menjadi solusi alternatif untuk penyediaan tanah tanpa konflik yang dapat memastikan keadilan di Indonesia. Dalam penerapan suatu peraturan-perundang-undangan diharapkan dapat menciptakan rasa adil dan mampu memberi manfaat kepada seluruh Masyarakat Indonesia. Amerika serikat dengan struktur, substansi, dan kultur yang berbeda dengan Indonesia dapat menciptakan Lembaga bank tanah yang mampu berkembang dan diterapkan dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kebijakan pengaturan bank tanah di Indonesia berdasarkan teori hukum yang berkeadilan serta mengetahui dan menganalisis perbandingan pengaturan antara bank tanah di Indonesia dengan bank tanah di Amerika Serikat dengan teori perbandingan sistem hukum Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi kepustakaan. Analisis data kualitatif dan hasil dari analisis data yang telah terkumpul ditarik Kesimpulan dan disajikan secara deduktif.

Hasil penelitian menemukan bahwa kebijakan pengaturan bank tanah di Indonesia masih belum memenuhi beberapa teori hukum yang berkeadilan dan belum efektif atau dirasakan bermanfaat bagi Masyarakat umum dari segi legitimasi pembentukan bank tanah, fungsi, sifat, tugas, dan wewenang dari bank tanah serta mengenai hak pengelolaan terhadap tanah yang dikelola bank tanah. Perbandingan hadirnya bank tanah di Indonesia dengan amerika serikat berdasarkan sistem hukum terlihat dari adanya struktur, substansi, dan kultur yang berbeda dari kedua negara tersebut dimana Amerika terdiri dari banyak negara bagian yang memiliki kedaulatan sendiri terhadap negara bagiannya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan pengaturan bank tanah di Indonesia belum memenuhi beberapa teori hukum yang berkeadilan serta banyaknya konflik pertanahan terkait dengan hadirnya Badan Bank Tanah Indonesia, hadirnya badan bank tanah seharusnya menjamin ketentuan dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI. Sistem hukum yang berbeda menyebabkan perbedaan dalam struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum antara Negara Indonesia dengan Amerika.

Kata Kunci: Bank Tanah; Pengaturan; Perbandingan.

ABSTRACT

The complexity in land acquisition issues indicates the need for the government to promptly reassess land policies. Thus far, the government has utilized land acquisition instruments to obtain land required for public facility development. The concept of land banks could serve as an alternative solution for land provision without conflicts, ensuring justice in Indonesia. In implementing regulations, it is hoped that a sense of fairness can be created and benefit the entire Indonesian society. The United States, with its different structure, substance, and culture compared to Indonesia, could establish a land bank institution that can thrive and be effectively implemented.

This research aims to understand and analyze the policy of regulating land banks in Indonesia based on theories of justice in law, as well as to compare the regulation of land banks between Indonesia and the United States using the comparative legal system theory. The research method employed in this study is a juridical-normative approach with descriptive-analytical research specifications. Secondary data sources through literature studies are utilized. Qualitative data analysis is conducted, and conclusions are drawn deductively from the collected data.

The research findings reveal that the policy of regulating land banks in Indonesia still does not fully comply with several theories of justice in law and is not yet effective or perceived as beneficial to the general public in terms of the legitimacy of land bank establishment, functions, nature, duties, authorities of land banks, and regarding the rights to manage the land managed by land banks. A comparison between the presence of land banks in Indonesia and the United States based on legal systems shows differences in structure, legal substance, and legal culture between the two countries, where the United States consists of many states with their own sovereignty over their respective territories.

The conclusion of this study is that land bank regulation in Indonesia have not fully aligned with several theories of justice law, and there are numerous land conflict related to the presence of the Indonesian Land Bank Authority. The presence of the land bank should guarantee the provisions of Article 33 of paragraph (3) of the Indonesia Constituion. Different legal system cause differences in legal structure, legal substance, and legal culture between Indonesia and America

Keywords: Land bank; Regulation; Comparison.